



## Implementasi Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak (KAS RPA) Kampung Aman Di Kelurahan Balongsari Kota Surabaya

Nadiya Suluki<sup>1</sup>, Aulia Malina Destria Putri<sup>2</sup>, Putri Kusnul Aisyah<sup>3</sup>, Queena Lindi Ega Kartika<sup>4</sup>, Zain kholishotul Ma'rufah<sup>5</sup>, Tjitjik Rahaju<sup>6</sup>, Ardiyansah<sup>7</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi: [24040674009@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674009@mhs.unesa.ac.id), [24040674005@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674005@mhs.unesa.ac.id),  
[24040674013@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674013@mhs.unesa.ac.id), [24040674016@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674016@mhs.unesa.ac.id), [24040674035@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674035@mhs.unesa.ac.id),  
[tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id), [ardiyansah@unesa.ac.id](mailto:ardiyansah@unesa.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Juni 2026

### ABSTRACT

The high number of cases of violence against women in Indonesia reached 27,658 in 2024. As a metropolitan city, Surabaya saw an increase of around 35% in the number of cases of violence against women between 2023 and 2024. This situation indicates that efforts to address violence against women at the local level still need to be strengthened through a more systematic and community-based approach. The Surabaya city government initiated the Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) program as a local policy innovation line with SDG 5 on Gender Equality. This study aims to analyze the implementation of the KAS RPA Safe Village indicator in the Balongsari sub-district using George C. Edwards III's theory with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with sub-district officials, the DP3APPKB, and female benefit recipients. The results indicate that implementation has proceeded fairly well through regular socialization, the formation of PPA task forces at the RT level, and cross-sectoral collaboration. However, challenges remain, as victims often choose to remain silent and resolve issues through informal negotiations.

**Keywords:** Policy, Implementation, Protection, Woman, Children

### ABSTRAK

Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 27.658 kasus pada tahun 2024. Surabaya sebagai kota metropolitan mengalami peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan sekitar 35% pada tahun 2023-2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kota masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis komunitas. Pemerintah kota Surabaya menginisiasi program Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) sebagai inovasi kebijakan daerah yang sejalan dengan SDGs 5 tentang Kesetaraan Gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KAS RPA indikator Kampung Aman di kelurahan Balongsari menggunakan teori George C. Edwards III dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak kelurahan, DP3APPKB, dan masyarakat perempuan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan cukup baik melalui sosialisasi rutin, pembentukan Satgas PPA di tingkat RT dan adanya



---

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Program KAS RPA mencakup lima indikator utama, yaitu Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, Kampung Aman, dan Kampung Kreatif Produktif. Fokus penelitian ini diarahkan pada indikator Kampung Aman, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Kelurahan Balongsari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memperoleh predikat terbaik dalam kategori Kampung Aman, sehingga relevan untuk dikaji sebagai praktik implementasi program di tingkat kelurahan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Subarsono, 2015). Model ini bersifat top down yang melihat bagaimana kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan oleh aparat pelaksana di tingkat bawah (Kadji, 2015). Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Widokarmeilani et al. (2025), menemukan bahwa implementasi KAS RPA di Kelurahan Kandangan menunjukkan sinergitas kebijakan yang cukup baik melalui adanya persamaan persepsi antara stakeholder, komunikasi dan koordinasi yang berjalan secara terbuka, dan komitmen positif dari para aktor pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan program masih belum optimal akibat keterbatasan fasilitas dan kurangnya jumlah kader aktif yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Arrohmati dan Pertiwi (2024), menemukan bahwa implementasi program KAS RPA Kampung Asuh di Kelurahan sidosermo berhasil karena komunikasi antar organisasi yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten. Rahma dan Arundinasari (2025), dalam penelitiannya program KAS RPA masih belum berjalan secara optimal karena kekurangannya informasi kepada warga dan keterbatasan fasilitas dalam implementasi Kampung Belajar di Gunung Anyar.

Dari penelitian terdahulu tersebut, masih minim penelitian yang membahas implementasi Program KAS RPA khususnya indikator Kampung Aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kampungnya Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak khususnya Kampung Aman di Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap kajian implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan program.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang

alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program KAS RPA Kampung Aman dijalankan dengan menerapkan model implementasi George C. Edwards III (1980). Penelitian dilaksanakan di kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Balongsari merupakan salah satu wilayah yang memperoleh predikat terbaik dalam kategori Kampung Aman pada Program KAS RPA. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Program KAS RPA Kampung Aman dengan menggunakan 4 variabel model implementasi George C. Edwards III (1980) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023, laporan pencapaian Program KAS RPA, dan data statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA). Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengambilan sampling yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, pertama informan kunci yang terdiri dari Pegawai Kelurahan Balongsari dan Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Kedua, informan utama terdiri dari Koordinator Program KAS RPA dan perempuan penerima manfaat yang berjumlah 4 orang. Total Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi untuk mengamati secara langsung pelaksanaan Program KAS RPA Kampung Aman di Kelurahan Balongsari. Kedua, wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang telah ditentukan secara purposif untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi program. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen berupa peraturan daerah, laporan program, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan Program KAS RPA Kampung Aman. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles and Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data dimana data yang telah didapat akan disederhanakan dan dianalisis agar lebih terarah. Kedua, penyajian data melalui narative untuk memudahkan pemahaman dan analisis pola atau hubungan antar data. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah disajikan melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KAS RPA indikator Kampung Aman di Kelurahan Balongsari telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program ini melibatkan beberapa pihak seperti Kelurahan, Satgas PPA, DP3APPKB, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan

---

Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB, pegawai Kelurahan Balongsari bidang KAS RPA, dan koordinator program KAS RPA Kelurahan Balongsari beserta masyarakat perempuan penerima manfaat, diperoleh temuan-temuan terkait implementasi program yang dianalisis menggunakan 4 variabel model George C. Edwards III (1980).

### **Komunikasi**

Penyampaian informasi mengenai Program KAS RPA indikator Kampung Aman di Kelurahan Balongsari dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa mekanisme. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB, menyampaikan bahwa informasi dari dinas ke kelurahan disampaikan melalui sosialisasi, FGD, ada berupa koordinasi yang melibatkan Kelurahan sebagai stakeholder. Apabila terdapat hambatan dalam komunikasi, maka akan diatasi melalui sesi diskusi dalam setiap pertemuan sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

Pada tingkat Kelurahan, Pegawai Kelurahan Balongsari Bidang KAS RPA menjelaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan LPMK RW se-wilayah Kelurahan Balongsari. Pihak kelurahan membuat aturan baru untuk mendukung program Kampung Aman yaitu dengan menghidupkan kembali siskamling di wilayah RT masing-masing yang dibuktikan dengan jadwal dan pelaksanaan, penerapan sistem one gate system, dan himbauan agar anak dibawa 18 tahun tidak keluar rumah di atas pukul 22.00 WIB. Ada pula kegiatan parenting yang memberikan pemahaman mengenai bullying dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya keberanian perempuan dan anak untuk melapor.

Koordinator program KAS RPA Kelurahan Balongsari menambahkan bahwa sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif kepada warga mengingat masyarakat memiliki kesibukan masing-masing. Rapat warga diadakan dengan membahas isu seperti keamanan terhadap perempuan dan anak, bahayanya narkoba dan judi online serta penanganan kebakaran. Meskipun warga memiliki kesibukan masing-masing, pengurus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan program agar tetap terlaksana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi Program KAS RPA indikator Kampung Aman di Kelurahan Balongsari telah berjalan cukup baik melalui mekanisme yang berjenjang dari dinas ke kelurahan hingga ke masyarakat. Dalam perspektif model George C. Edwards III (1980), komunikasi yang efektif memperhatikan tiga aspek utama yaitu penyampaian, kejelasan dan konsisten informasi. Hasil menunjukkan ketiga aspek tersebut telah dipenuhi dalam implementasi Program rogram KAS RPA.

Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi formal seperti rapat dan sosialisasi, serta informal melalui pertemuan warga. Kejelasan informasi dijaga melalui penyediaan buku saku dan panduan pelaksanaan program dari dinas, serta adanya penjelasan langsung mengenai program-program yang harus dijalankan seperti siskamling, one gate system, dan himbauan jam malam bagi

anak-anak. Konsisten informasi terpenuhi melalui pertemuan rutin bulanan dan koordinasi yang terintegrasi antar dinas Kecamatan, Kelurahan dan warga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Arrohmadi dan Pertiwi (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi antar organisasi yang baik dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi Program KAS RPA Kampung Asuh. Widokarmeilani et al. (2025) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pola komunikasi yang terbuka dan rutin dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program KAS RPA. Rahma dan Arundinasari (2025) pada Kampung belajar di Gunung Anyar mencatat adanya kekurangan informasi kepada warga yang menyebabkan pelaksanaan Program KAS RPA tidak dapat berjalan dengan lancar. Jalur komunikasi pelaksanaan Program KAS RPA di Kelurahan Balongsari lebih terstruktur dan memanfaatkan institusi yang sudah ada seperti PKK, LPMK dan KSH sehingga informasi dapat tersebar lebih luas kepada masyarakat.

### *Sumber Daya*

Program KAS RPA Kampung Aman di Kelurahan Balongsari masih belum memiliki anggaran khusus dari pemerintah. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB, menjelaskan bahwa anggaran dalam lingkup program KAS RPA hanya menunjang pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan pelatihan masyarakat. Sehingga program ini tidak berfokus pada pengalokasian anggaran sebagai daya dorong, tetapi lebih kepada perubahan mindset masyarakat dalam mewujudkan kampung yang ramah bagi perempuan dan anak.

Pegawai Kelurahan Balongsari Bidang KAS RPA menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini menggunakan Dana Kelurahan (DAKEL) yang diusulkan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel). Dalam forum tersebut, perwakilan perempuan dari PKK, KSH dan forum anak diundang untuk menyampaikan usulan terkait kebutuhan program. Pihak kelurahan juga mendapatkan dukungan fasilitas dari pemerintah kota Surabaya berupa poster hak anak dan area bermain anak. Koordinator Program KAS RPA Kelurahan Balongsari menjelaskan bahwa keterbatasan dana juga diatasi melalui kerjasama dengan pihak eksternal khususnya sekolah swasta yang berada di wilayah Kelurahan Balongsari. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan sarana seperti ruang laktasi, pengecatan jalur evakuasi, serta pemasangan banner dan pamflet mengenai informasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Dari segi sumber daya manusia program ini melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK. DP3APPKB bermitra dengan Pentahelix dalam melakukan pendampingan dan pemantauan termasuk tim ahli yang memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mahasiswa yang berperan sebagai pendamping dalam proses pemenuhan indikator KAS RPA.

Dari temuan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi Program KAS RPA Kampung Aman di Kelurahan Balongsari menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal anggaran. Program ini tidak memiliki anggaran khusus dari Pemerintah, sehingga pembiayaan mengandalkan Dana Kelurahan yang diusulkan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan,

serta dukungan dari pihak eksternal seperti sekolah swasta dan adanya fasilitas dari pemerintah kota Surabaya.

Edwards III menjelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa tersedianya sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik (Said et al., 2015). Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan adanya fasilitas yang mendukung.

Program tetap dapat berjalan meskipun terdapat keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia dari program ini melibatkan KSH, PKK, Satgas PPA tingkat RT serta mahasiswa pendamping dari Beasiswa Pemuda Tangguh yang difasilitasi oleh DP3APPKB. Kolaborasi dengan unsur Pentahelix melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat dan media juga memperkuat pelaksanaan program. Dari segi fasilitas, terdapat dukungan berupa dana untuk pengembangan area laktasi, area bermain anak poster hak anak, serta infrastruktur yang dibiayai melalui kerjasama dengan sekolah swasta.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutami et al. (2024) pada program DRPPA di Desa Rembang Kepuh yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dapat disiasati melalui komitmen pelaksana dan kemitraan dengan pihak lain. Namun, ketiadaan anggaran khusus dapat menjadi kelemahan dalam keberlanjutan program, terutama apabila dukungan dari pihak eksternal tidak konsisten atau kebutuhan program meningkat di masa mendatang.

### *Disposisi*

Dari segi disposisi, para pelaksana program memiliki komitmen dan sikap yang mendukung implementasi Program KAS RPA Kampung Aman. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB menyatakan bahwa komitmen dinas dalam pelaksanaan KAS RPA selaras dengan komitmen kota Surabaya dalam mewujudkan kota layak anak. Pegawai Kelurahan Balongsari Bidang KAS RPA menyatakan bahwa program ini sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Balongsari karena perlindungan terhadap perempuan dan anak memang harus dilakukan. Ketika terjadi kasus kekerasan, pihak kelurahan langsung melakukan tindak lanjut meski akhirnya ternyata hanya rumor.

Dalam kasus dugaan KDRT terhadap anak yang terjadi di Kelurahan Balongsari, pihak kelurahan tidak langsung mendatangi rumah korban akan tetapi melakukan koordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RT dan RW serta guru BK korban untuk menggali informasi. Kemudian barulah dilakukan pendampingan oleh psikolog dari PPA Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan disposisi yang aktif dan responsif dari pelaksanaan di tingkat Kelurahan.

Koordinator Program KAS RPA Kelurahan Balongsari menyatakan bahwa motivasi utama menjalankan program yaitu agar warga dapat merasakan kampung yang aman sehingga mereka berani untuk speak up apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pelaksana, baik di tingkat dinas, kelurahan, maupun masyarakat

---

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan program. Hal tersebut dilihat dari motivasi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Dalam perspektif model implementasi George C. Edwards III (1980), disposisi merujuk pada sikap komitmen dan kemauan para implementor dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh struktur dan sumber daya, tetapi juga oleh sikap, nilai, dan komitmen para pelaksana kebijakan (Leonard Nekwek, 2022). Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau menolak kebijakan, maka implementasi akan mengalami hambatan.

Fauzan (2024) menyoroti pentingnya sikap responsif Kelurahan dalam penanganan kekerasan. Di Kelurahan Balongsari, inisiatif dan tindak lanjut dilakukan secara proaktif bahkan sebelum ada laporan resmi menunjukkan disposisi yang aktif dan responsif dari para pelaksana. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa budaya diam yang menyebabkan korban kekerasan khususnya KDRT enggan melapor dan memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengubah budaya masyarakat agar lebih berani melapor.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program KAS RPA Kampung Aman di Kelurahan Balongsari bersifat hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas antar lembaga. Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak DP3APPKB menjelaskan bahwa dinas berperan sebagai pengawas dan pembina kegiatan KAS RPA yang bermitra bersama unsur Pentahelix sebagai pendamping kegiatan. Kecamatan dan kelurahan berperan sebagai pembina kewilayahan selaku stakeholder dalam sektor kewilayahan, sedangkan di tingkat RW berperan sebagai pelaksana kegiatan yang didampingi oleh mahasiswa sebagai pendamping lapangan.

Selama pelaksanaan program masih belum pernah terjadi tumpang tindih kewenangan antar pihak. Berbagai program justru saling bersinergi dan membentuk kampung yang ramah perempuan dan anak. Babinsa dan Babinkamtibmas berperan untuk keamanan sedangkan psikolog difasilitasi oleh dinas untuk penanganan korban. Kerjasama juga dilakukan dengan Polsek Tandes, Puspaga, dan DP3APPKB dalam pelaksanaan program yang didukung dengan siskamling di setiap RT untuk meminimalisir hal yang dapat mengganggu keamanan.

Dalam perspektif model implementasi George C. Edwards III, struktur birokrasi merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas implementasi kebijakan publik (Manik, 2022). Struktur birokrasi berkaitan dengan organisasi pelaksana kebijakan serta mekanisme kerja yang digunakan. Apabila terdapat struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan. Model Edwards III menekankan dua aspek utama dalam struktur birokrasi yaitu standar operating procedure (SOP) dan Fragmentasi.

Pada penelitian menemukan bahwa tidak terdapat SOP mandiri di tingkat Kelurahan. Kelurahan hanya mengacu pada panduan dari dinas dan menyampaikan ke RT dan RW untuk dijalankan. Kondisi ini dapat menjadi kelemahan dalam hal

fleksibilitas respon terhadap kondisi lokal yang spesifik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Putra (2025) yang merekomendasikan pentingnya pedoman pelaksanaan yang seragam dari pusat agar implementasi tidak berjalan secara berfragmentasi antar wilayah. Meskipun hal ini menunjukkan inisiatif dan kreativitas dari tingkat lokal 6 dapat menyebabkan ketidakseragaman pelaksanaan program antar RW dan berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi di tingkat Kelurahan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program KAS RPA indikator Kampung Aman di Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya telah berjalan cukup baik berdasarkan 4 variabel model George C. Edwards III. Indikator komunikasi, program dilaksanakan secara berjenjang melalui sosialisasi, pertemuan LPMK, PKK dan kelas parenting rutin yang efektif meningkatkan pemahaman masyarakat. Indikator sumber daya dioptimalkan melalui dana kelurahan, kolaborasi dengan pihak eksternal dan keterlibatan aktif KSH, PKK, serta Satgas PPA. Disposisi pelaksana sangat positif dengan sikap responsif dalam menangani laporan kekerasan melalui koordinasi lintas sektor meskipun budaya diam masyarakat masih menjadi kendala. Struktur birokrasi berjalan dengan koordinasi hierarkis dan pembagian peran yang jelas, namun SOP mandiri di tingkat Kelurahan mengurangi fleksibilitas pelaksanaan program. Keberhasilan program dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Kelurahan Balongsari perlu diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan. Hal ini untuk mengubah budaya diam, penyediaan anggaran khusus yang berkelanjutan, dan penyusunan pedoman pelaksanaan yang dapat diadaptasi di tingkat Kelurahan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi program KAS RPA pada indikator lain atau di Kelurahan berbeda sebagai bahan perbandingan guna memperkaya kajian implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal. Hal tersebut ditujukan untuk mengeksplorasi strategi efektif dalam mengubah budaya masyarakat agar lebih berani melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arrohmati, L. L., & Vidya Imanuari Pertiwi. (2024). Implementasi Program Kas-Rpa Kampung Asuh Dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Journal Publicuho*, 7(1), 10-19. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.303>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (Politics a). Congressional Quarterly Press.
- Fauzan, R. (2024). Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(2), 96-118. <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v1i2.2024.387>
- Fresy Widokarmeilani, Radjikan Radjikan, & Muhammad Roisul Basyar. (2025). Sinergitas Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang

- Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berbasis KAS-RPA di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 234-254. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.766>
- Humbert, A. L., & Strid, S. (2025). Intersectionality and Gender-Based Violence: An Empirical Multi-Level Examination of Prevalence and Frequency in Universities and Research Organizations. *Violence Against Women*, 31(10), 2553-2573. <https://doi.org/10.1177/10778012241265363>
- Kadji, Y. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Cetakan Pe). UNG Press Gorontalo. <https://share.google/CiMOIV8HCUSc2zkWp>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Leonard Nekwek. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 141-151. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.40>
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177-188. <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>
- Miles, A. Matthew; Huberman, M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publicatin.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 4 Tahun 2019: Mengatur tentang Pengarusutamaan Gender. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3615#:~:text=%2D-bahwa%20dalam%20rangka%20percepatan%20pengarusutamaan%20gender%20dalam%20pembangunan%20di%20Kota,kegiatan%20pembangunan%20yang%20responsif%20gender.&text=%2D-Setiap%20warga%20negara%20bersamaan%20kedudukannya%20di%20dalam%20hukum%20dan%20pemerintahan,dari%20perlakuan%20yang%20bersifat%20diskriminatif>
- Pérez-Fernández, O., Quintero Ávila, O., Barros, C., & Rosario Michel, G. (2025). Spatio-Temporal Mapping of Violence Against Women: An Urban Geographic Analysis Based on 911 Emergency Reports in Monterrey. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(10), 1-25. <https://doi.org/10.3390/ijgi14100367>
- Putra, I. P. A. P. (2025). Pembangunan Desa berbasis Gender: Analisis Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan di Kota Denpasar. *Jurnal Good Governance*, 189-202. <https://doi.org/10.32834/gg.v21i2.945>
- Rahma, F. A., & Arundinasari, I. (2025). Strategy for Implementing the KAS-RPA Program (Kampung Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak) Kampung Belajar in Gunung Anyar District. *Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 378-387. <http://jurnaldialektika.com/>
- Said, L. O. A., Mardiyono, & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan

- Persampahan Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 53–60.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Sutami, B., Rozikin, M., & Yumarni, T. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PROGRAM DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(4), 194–200.